

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM INOVASI
PROGRAM LORONG WISATA DI KELURAHAN KASSI-KASSI
KOTA MAKASSAR**

SHOFIYAH SABIRIN DAUD NOMPO

E011201034



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Shofiyah Sabirin Daud Nompo
NIM : E011201034
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Collaborative Governance Dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Mei 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.
NIP 197205072002121001

Pembimbing II,

Nuralamsyah Ismail, S.Sos, MA
NIP

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

Prof. Dr. Alwi, M.Si.
NIP 196310151989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Shofiyah Sabirin Daud Nompo

NIM : E011201034

Program Studi : Administrasi Publik

Departemen : Ilmu Administrasi

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar” benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 13 Mei 2024

Yang Menyatakan:



Shofiyah Sabirin Daud Nompo
NIM E011201034



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shofiyah Sabirin Daud Nompo
NIM : E011201034
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Collaborative Governance Dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Mei 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.

(.....)

Sekretaris : Nuralamsyah Ismail, S.Sos, MA

(.....)

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA

(.....)

2. Dr. Amril Hans, MPA

(.....)



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Shofiyah Sabirin Daud Nampo (E011201034) dengan judul skripsi “Collaborative Governance dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar”. 75 Halaman + 2 Tabel + 2 Gambar + Lampiran, Dibimbing oleh Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P. dan Nuralamsyah Ismail, S.Sos, MA

Pemerintah Kota Makassar memiliki visi dan misi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setelah wabah Covid-19 dengan membuat program yang dinamakan lorong wisata untuk memperbaiki ekonomi masyarakat di lorong. Dalam pelaksanaan program lorong wisata pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan pihak swasta. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kolaborasi dalam pelaksanaan program lorong wisata di Kota Makassar salah satunya di Kelurahan Kassi-Kassi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan dari Kelurahan Kassi-Kassi dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa indikator yang belum maksimal yaitu pada indikator desain institusional dan kepemimpinan fasilitatif dapat dikatakan belum maksimal karena bukti kerja sama antara dua belah pihak belum terealisasi dan fasilitas yang diberikan belum cukup memadai demi keberlangsungan program lorong wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar.

Kata Kunci : Kolaborasi Pemerintah, Inovasi Program Lorong Wisata



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Shofiyah Sabirin Daud Nampo (E011201034) with the thesis title "Collaborative Governance in Innovation of the Tourist Hallway Program in Kassi-Kassi Subdistrict, Makassar City". 75 Pages + 2 Tables + 2 Figure + Attachment, Supervised by Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P. and Nuralamsyah Ismail, S. Sos, MA

The Makassar City Government has a vision and mission to improve the quality of life of the community after the Covid-19 outbreak by creating a program called tourism alley to improve the economy of the people in the alley. In implementing the tourist alley program, the Makassar City government collaborates with the private sector. For this reason, it is necessary to carry out an analysis of collaboration in implementing the tourist alley program in Makassar City, one of which is in Kassi-Kassi Village. This research aims to find out how Collaborative Governance is implemented in the Innovation of the Tourist Hallway Program in Kassi-Kassi Village, Makassar City. This research uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash with the indicators used, namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaboration Process. The method in this research uses a descriptive qualitative approach by obtaining primary data sourced from interviews and observations. The secondary data obtained from the Kassi-Kassi sub-district is said to be quite good, this is proven by the fact that there are still several indicators that have not been maximized, namely the indicators of institutional design and facilitative leadership which can be said to have not been maximized because there is evidence of cooperation between the two parties not being realized and the facilities provided not sufficient for the sustainability of the tourist alley program in Kassi-Kassi Village, Makassar City.

Keywords: Government Collaboration, Tourism Hallway Program Innovation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh... Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Collaborative Governance Dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula mengucapkan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan karunia ilmu pengetahuan yang tiada batasnya.

Penulis tentunya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kendala dan hambatan, tetapi berkat rahmat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phil Sukri, S. IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Pembimbing I.
5. **Nuralamsyah Ismail, S. Sos, MA** selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.
6. **Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Amril Hans, MPA** selaku Dewan Penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Para dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, terima kasih atas didikan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan dan semoga apa yang penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
8. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (**Pak Lili, dan Pak**

Andi Revi), dan staf di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali.

Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.

9. Terima kasih kepada seluruh **Pegawai Kantor Kelurahan Kassi-Kassi**, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini dan telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua saya **Hj. Hasliah Sabirin dan H. Sabirin Daud Nompo** atas doa yang tiada hentinya, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan dukungan yang terus diberikan kepada penulis hingga saat ini.
11. Terima kasih kepada saudara penulis, **Maghfira Sabirin, Heru Nugraha, Hary Dwi Dermawan dan Muhammad Zulkifli** yang telah mensupport dan membantu penulisan Skripsi ini.
12. Terima Kasih kepada **Muh Tatun Anugerah** telah memberikan semangat dan mensupport saya serta mendampingi saya menyusun skripsi ini
13. Terima kasih kepada Sahabat saya (**Ade, Hariza, Difa**) yang selalu ada disaat suka maupun duka dalam penyelesaian skripsi saya.
14. Terima kasih kepada Sahabat AIESEC saya (**Moyo, Jamil, Ataya, Fika, Jihan, Ila, Nandiv, Zarah, Arqam, Tasmel**) yang selalu menemani saya dan memberikan semangat, motivasi

untuk menyelesaikan skripsi saya.

15. Terima kasih kepada Teman Kuliah saya (**Ifa, Anas, Evi dan dinim**) yang telah membantu saya menyusun berkas skripsi.
16. Terima kasih kepada teman seperjuangan **PENA 2020** yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan batuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa.
17. Terima kasih kepada teman-teman organisasi saya (**AISEEC in UNHAS**) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru di luar perkuliahan
18. Terima kasih kepada **semua pihak** yang telah terlibat dan berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan keikhlasannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambahkan informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulis skripsi ini. Terima Kasih.

Makassar, 19 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Collaborative Governance.....	10
1. Pengertian Collaborative Governance.....	10
2. Model Collaborative Governance.....	12
B. Konsep Inovasi.....	14
1. Pengertian Inovasi.....	14
2. Tujuan Inovasi.....	15
3. Prinsip-Prinsip Inovasi.....	16
C. Program Lorong Wisata.....	17
1. Konsep Program.....	17
2. Konsep Lorong Wisata.....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	21
E. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Unit Analisis.....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Informan.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar.....	38
B. Gambaran Umum Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar.....	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kondisi Awal Kolaborasi.....	44
B. Desain Kelembagaan.....	47
C. Kepemimpinan Fasilitatif.....	48
D. Proses Kolaborasi.....	52
1. Hasil Sementara.....	53
BAB VI PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kassi-Kassi.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengembangan daerah dimaknai sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013). Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia terlebih lagi di kota Makassar.

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang berkembang jika dilihat dari indikator pertumbuhan penduduk, dan pembangunan fasilitas seperti pusat belanja, pemukiman dan pembangunan spot wisata. Penduduk kota Makassar pada tahun 2021 mencapai 1.427.619 jiwa yang terdiri dari 711.006 jiwa laki-laki dan 716.613 jiwa perempuan. Sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Pemerintah kota Makassar setiap tahun berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perkotaan. Pada tahun 2021 Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata (LONGWIS) sebagai program dalam penanggulangan dampak ekonomi dan pariwisata setelah COVID-19. Program Lorong Wisata menjadi program unggulan pemerintah kota Makassar tak hanya dalam penanggulangan masalah sampah akan tetapi menjadi solusi dalam menarik wisatawan

dengan partisipasi masyarakat dan juga perangkat daerah.

Pembentukan Program Lorong Wisata dibuat atas dasar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 dimana program ini merupakan perwujudan kebangkitan ekonomi masyarakat di kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Dalam pengembangan program Lorong Wisata oleh pemerintah kota Makassar dibutuhkan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat dalam mewujudkan Good Governance. Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator dan memiliki peran serta fungsinya dalam membuat dan menentukan seluruh kebijakan atau program demi kebersihan serta keindahan lingkungan setempat yang dapat menarik wisatawan. Di tahun pertama Lorong Wisata dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar diberlakukan target yaitu 7 lorong pada masing masing kelurahan sehingga pada tahun 2022 telah terbentuk lebih dari 1.000 Lorong Wisata yang tersebar di seluruh wilayah kota Makassar dari target 5.000 Lorong Wisata selama periode Walikota 2021-2024 berlangsung dengan bantuan dari masyarakat setempat, NGO dan juga kerjasama dengan pihak swasta.

Inovasi Program Lorong Wisata digerakkan dengan berbagai sumber daya untuk menjamin keberlanjutannya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam Inovasi ini adalah kolaborasi dari perangkat daerah dan masyarakat lorong. Perangkat daerah membina masyarakat secara berkelanjutan, salah satunya dalam bentuk kontribusi oleh penyuluh pertanian. Hasil-hasil panen masyarakat di lorong dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga masyarakat lorong merasa perlu untuk terus menjalankan kegiatan ini. Dengan adanya

Lorong Wisata, potensi kuliner, UMKM, dan industri kecil dapat lebih berkembang dengan bantuan SKPD terkait. Lorong wisata merupakan program strategis yang tentunya banyak manfaat yang dihasilkan. Selain membuka lapangan pekerjaan juga secara tidak langsung memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat lorong menjadi lebih sejahtera. Unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar Inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumber daya yang digunakan untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan dari adanya Inovasi ini.

Keberadaan Regulasi terkait yang mendukung pelaksanaan Inovasi ini yaitu Peraturan Walikota Makassar nomor 94 tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa alokasi anggaran; Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) Sumber daya manusia; Dewan Lorong, Gugus Tugas Lorong, Tim Teknis Lorong, Sekretariat Tugas Lorong Wisata, dan Pengawasan. Dewan Lorong, terdiri atas unsur tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan unsur tokoh perempuan. yang memiliki tugas menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, pendampingan dalam pengembangan Lorong Wisata, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan serta stakeholder terkait, mengelola dan menjaga aset yang ada di Lorong Wisata, serta melakukan pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan Lorong Wisata Gugus Tugas Lorong Wisata beranggotakan wakil dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengumpulkan data, menyusun prioritas program, melakukan evaluasi, monitoring, dan

pelaporan kebijakan pelaksanaan, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Tim Teknis Lorong Wisata dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya pada pelaksanaan program Lorong Wisata, yang bertugas mengkoordinir naham penetapan Lorong Wisata, melaksanakan kegiatan Lorong Wisata, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Inovasi Program Lorong Wisata ini telah menjadi program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan semakin diakui di Indonesia. Terbukti, program yang diinisiasi Wali Kota Makassar berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih banyak penghargaan. Salah satunya Indonesia Awards 2023 kategori Outstanding Award For Integrity Initiative untuk Program Lorong Wisata Penghargaan itu diterima langsung Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam acara Indonesia Awards 2023 yang diselenggarakan INews Media Group di Jakarta Concert Hall INews Tower, Kamis (31/08/2023). Ini membuktikan keberhasilan dalam upaya Pemerintah Kota Makassar membangun kualitas pembangunan dengan baik.

Salah satu Kecamatan di Kota Makassar sudah menerapkan Lorong Wisata yaitu Kecamatan Rappocini. Kecamatan rappocini telah menerapkan 78 Lorong Wisata di setiap kelurahan. Salah satu kelurahan yang terbaik sejauh ini dalam pengembangannya ialah kelurahan kassi karena Kelurahan kassi-kassi yang mencerminkan program lain dengan sikap peduli terhadap lingkungan, hal ini menandakan bahwa diantara beberapa daerah yang kumuh serta kotor yang berada pada Kota Makassar, masih terdapat beberapa daerah yang memperhatikan aspek kebersihan, serta estetika kota. Hal tersebut bisa dijadikan acuan atau contoh buat terciptanya Makassar

kota bebas sampah. Seperti di daerah Kelurahan Kassi-Kassi, bisa dijadikan menjadi acuan buat penerapan kesadaran kolektif terhadap aspek kebersihan dan keindahan lingkungan.

Warga Kelurahan Kassi-Kassi menerapkan aspek kebersihan lingkungan jauh hari sebelumnya, hal tadi terwujud berdasarkan kerja bakti dan solidaritas warga Kassi-Kassi agar tetap menjaga kebersihan lingkungan yang secara rutin dilakukan. Berdasarkan pengamatan, tentu menyimpan pertanyaan, perihal apakah yang melatarbelakangi lingkungan tersebut selalu tampil asri setiap saat pemandangan lingkungan yang begitu asri, menyimpan kesan tersendiri di tengah keramaian kota yang berisik. Meskipun aspek kebersihan yang nampak pada Kelurahan Kassi-Kassi terbilang tak tanggal asal campur tangan pemerintah Kelurahan Kassi-Kassi, namun kesadaran warga juga perlu diapresiasi, karena tidak akan tercipta lingkungan bersih serta tidak akan berjalan lancar tanpa terdapat kolaborasi antara pemerintah, dan masyarakat. Dengan reaksi serta perilaku yang sporadis ditemui ini, tentu menjadi pertimbangan menjadi acuan untuk mengkaji fakta lebih dalam wacana sesuatu yang mendasari pencerahan kolektif masyarakat menyikapi sampah.

Implementasi kesadaran kolektif rakyat pada kebersihan lingkungan pada bentuk partisipasi warga melakukan kerja bakti dan solidaritas rakyat Kelurahan Kassi-Kassi. Dilain sisi diatas erat relevansinya menggunakan program Pemerintah Kota Makassar, yaitu proses penerapan program Lorong wisata yang bersentuhan dengan kebersihan lingkungan dan pengembangan ekonomi. Namun, program ini masih sangat rendah dalam menciptakan lingkungan bersih dan pengembangan ekonomi, terkendala oleh lemahnya pencerahan kolektif rakyat, serta kurangnya fasilitas kebersihan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Syani, 1994), bahwa kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Hal ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Konsep kolaborasi ini kemudian berkembang sampai konsep kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya yang sering diklaim sebagai *collaborative governance*.

Lebih lanjut, Ansell and Gash (2007: 543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat berbagai pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Konsep *collaborative governance* didefinisikan menjadi susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara pribadi terlibat menggunakan stakeholder non pemerintah pada proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus serta deliberatif, yang bertujuan menghasilkan atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset. dengan hadirnya konsep *collaborative governance* maka diperlukan akan terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah maupun stakeholder non pemerintah.

Proses kolaborasi dalam program Lorong Wisata antara pemerintah kota Makassar dan pihak non-pemerintah dapat membantu keberlangsungan program utamanya dalam hal sumber daya. Hal ini telah dilakukan pemerintah kota Makassar melalui kerjasama dalam program Lorong Wisata dengan salah satu pihak swasta (Gojek) saat pembentukan Lorong Wisata pertama kali pada tahun 2021. Dalam pembentukan Lorong Wisata, pemerintah kota Makassar menghibau agar setiap Lorong memiliki daya tarik dalam hal kuliner, budidaya tanaman/ikan, kerajinan tangan serta ciri khas seperti mural dan spot foto bagi pengunjung lorong. Namun, tidak semua Lorong Wisata aktif dalam mengembangkan semua potensi lorong yang dimiliki. Beberapa hanya mengembangkan potensi kuliner dan beberapa hanya mengembangkan potensi kerajinan. Hal ini dipengaruhi dengan bagaimana proses kolaborasi yang terjadi di dalam sebuah lorong, apakah kolaborasi berjalan dengan baik ataupun ada hal yang menghambat terjadinya kolaborasi sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.

Walikota Makassar membentuk Dewan Lorong yang disingkat D'Lor, mereka bertugas di Lorong Wisata, sebagai motivator bagi warga yang ada di 33 lorong, menjaga properti lorong dan mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar. Adapun tujuan Lorong Wisata yaitu

1. Program ini diharapkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi;
2. Membangun kesadaran/perilaku warga akan pentingnya kebersihan dan keindahan lorong;
3. Mengaplikasikan ide kreatifitas warga sekitar;
4. Mengenalkan Makassar pada Dunia.

Pada Kelurahan Kassi-kassi sudah berkembang 11 Lorong Wisata. Berdasarkan hasil penelitian dahulu yang dilakukan, penelitian mengenai Program Lorong Garden atau biasa juga disebut Lorong Wisata menganalisis pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lorong dan model pengelolaan lorong yang diterapkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan lorong garden sebagai kelanjutan dari program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan desain program Lorong Wisata serta efektivitas pelaksanaan program melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, Lorong Wisata menjadi menarik untuk di fokus penelitian. Namun penelitian terdahulu belum menggambarkan konsep kolaborasi dalam pengembangan ekonominya. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ***Collaborative Governance* dalam Inovasi Program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam mengelolah Inovasi program Lorong Wisata di Kelurahan Kassi-Kassi?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam Inovasi program Lorong Wisata di Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini:

1. Akademis

Penelitian ini merupakan aktualisasi dari salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yaitu penelitian sekaligus menjadi sarana dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah maupun perangkat daerah di Kota Makassar dalam berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mewujudkan Inovasi program Lorong Wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep *Collaborative Governance*.

1. Pengertian *Collaborative Governance*

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internalnya untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program. Keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan jaringan yang mendukung faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu program atau kebijakan pemerintah mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Menurut (Ansell, 2007: 534) disebutkan bahwa pemerintahan kolaboratif merupakan strategi baru dalam pengelolaan pemerintahan yang mempertemukan para pembuat kebijakan yang berbeda dalam forum yang sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Ansell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non negara dalam proses pembuatan kebijakan kolektif dan formal, berorientasi konsensus, dan konsultasi dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik, dan mengelola program atau aset masyarakat.

Tata kelola kolaboratif adalah alat yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, dan tata kelola koperasi adalah alat yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, karena tata kelola koperasi menciptakan kepemilikan bersama atas masalah tersebut. Aktor yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu masalah, tidak mudah untuk menciptakan pemahaman antar peran

seorang aktor.

Collaborative governance berperan sebagai mediator agar para pelaku dapat menempe pemahaman yang sama tentang masalah (C.Ansell, 2014: 172) Tata kelola kolaboratif juga dapat menggambarkan keadaan aktor yang saling berhubungan. Keinginan untuk melakukan tata kelola kolaboratif muncul karena para aktor memahami batasan mereka. Setelah itu, para aktor tersebut harus mengungkapkan keinginan dan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan aktor lainnya. Setiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi aktor lainnya. Setelah aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, sangat penting untuk membangun rasa kepemilikan bersama dari setiap kolaborasi (C. Ansell, 2014: 178).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif adalah proses penataan jaringan multi sektoral dan multi organisasi (tata kelola, swasta, dan masyarakat sipil) yang membentuk kesepakatan bersama, keputusan bersama, mencapai konsensus melalui interaksi formal dan informal, menetapkan dan mengembangkan standar. Aturan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam kerjasama interaktif yang terkesan sederajat, yakni semua aktor memiliki posisi yang sama.

Menurut (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012: 02) menjelaskan bahwa tata kelola koperasi merupakan suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dalam kebijakan dan penyelenggaraan publik yang melibatkan aktor-aktor yang datang secara konstruktif dari berbagai tingkatan, baik di tingkat pemerintahan dan / atau badan publik. Dan lembaga swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan umum yang tidak dapat dicapai jika hanya satu pihak yang

melaksanakannya.

Dimana tiga proses dalam tata kelola kolaboratif adalah a) dinamika kerjasama, b) aksi kolaboratif, dan c) pengaruh dan adaptasi dari proses kerjasama (Balogh, Kirk, Nabache, Tina, 2012)

O`Leary Bingham dan Gerard (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012: 02) mendefinisikan *bahwa collaborative governance* merupakan sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sector swasta public dan masyarakat

2. Model Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007) *collaborative governance* adalah proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Guna mendapatkan tujuan yang maksimal dalam melaksanakan *Collaborative Governance*, Ansell and Gash memberikan model teori *Collaborative Governance* yang didalamnya terbagi menjadi empat dimensi dalam *Collaborative Governance* meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang selanjutnya akan dijelaskan berikut ini:

1. Kondisi Awal

Menurut Ansell and Gash (2007:550) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama ataupun pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama

atau kolaborasi. Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda, namun permasalahan yang sedang dihadapi memiliki kesamaan yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan adanya kecemasan publik. Terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi kondisi awal dalam memulai kolaborasi yaitu:

- a. Ketidakseimbangan Sumber Daya
- b. Ketersediaan insentif untuk berpartisipasi
- c. Adanya ketakutan terjadinya konflik

2. Desain Kelembagaan

Menurut Ansell And Gash (2007:555-557) bahwa Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negosiasi itikad baik dan mengeksplorasi, kompromi dan perolehan bersama. Menurut model *collaborative governance* Ansell and Gash dimensi desain kelembagaan dalam kolaborasi meliputi partisipasi, forum terbatas, aturan dasar sebagai pendukung kolaborasi dan transparansi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukan bagi pemimpin pemerintahan atau pemimpin lembaga atau instansi organisasi, akan tetapi siapapun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif selama ia bisa menggerakkan, memfasilitasi serta mendorong untuk mensukseskan tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Siapapun bisa menjadi pendorong serta memfasilitasi dan sebagai penghubung dan memimpin aktor atau stakeholder dalam kolaborasi dapat disebut pemimpin yang fasilitatif. Dalam kepemimpinan fasilitatif, fasilitas diberikan tanpa mengganggu pada hak para pemangku kepentingan, peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menjelajahi keuntungan bersama.

4. Proses Kolaborasi

Ansell and Gash (2007:557-561) mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka (Face to Face), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan saling memahami

II.2 Konsep Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Definisi Inovasi sendiri berbeda-beda tergantung dari pendekatan

yang digunakan. Menurut Drucker (2012) dalam Makmur dan Thahier (2015), Inovasi adalah alat spesifik bagi perusahaan dimana dengan Inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda. Hal ini dapat direpresentasikan sebagai sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktekkan.

Inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berangkat dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya dalam melakukan sesuatu. Untuk Inovasi sendiri terdiri dari dua tipe yaitu Inovasi proses dan Inovasi produk. Proses Inovasi adalah perubahan yang mempengaruhi cara output dalam produksi, sedangkan Inovasi produk sendiri memiliki definisi sebaliknya yaitu Inovasi produk adalah perubahan dalam output aktual baik itu barang maupun jasa itu sendiri (Bateman & Snell, 2009, p. 610).

Istilah Inovasi berorientasi pada pemikiran dan perbuatan manusia. Perubahan yang berhubungan dengan binatang, alam, angkasa, mesin, dan benda-benda lainnya tidak tepat dikatakan ungkapan Inovasi, kecuali manusia yang layak diberikan julukan simbol berInovasi. Perubahan di sini terutama berhubungan dengan bentuk, warna, waktu dan sebagainya dimana proses perubahan berkembang secara alamiah. Berdasarkan argumentasi di atas, mengungkapkan bahwa perubahan dalam kebaruan tidak selamanya diindikasikan sebagai Inovasi. Sesuatu dapat dikatakan sebagai Inovasi apabila pembaruan yang terjadi karena proses pemikiran atau tindakan manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan kemampuan sehingga menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia (Makmur & Thahier, 2015, pp. 9-10).

2. Tujuan Inovasi

Menurut Makmur dan Thahier (2015, p. 26), tujuan Inovasi secara umum adalah sesuatu bentuk kebutuhan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan mengkonstruksi pemikiran dengan diimplementasikan dalam tindakan nyata atau pekerjaan nyata untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Sedangkan tujuan Inovasi secara spesifik berdasarkan jenis profesi sebagai pengusaha adalah menciptakan suatu kondisi agar bidang usahanya dapat berkembang dengan baik. Tujuan Inovasi berdasarkan empat sisi pandang adalah (Makmur & Thahier, 2015, p. 28):

1. Perspektif anggaran atau finansial, yaitu terus menerus mencari sebuah Inovasi untuk menemukan cara baru dimana menggunakan anggaran yang relatif kecil, tetapi mendapatkan hasil yang banyak.
2. Perspektif pelanggan, yaitu semua elemen dalam perusahaan yang terus menerus berinovasi untuk mencari pelanggan yang banyak dan memberikan layanan yang terbaik.
3. Perspektif pengelolaan bisnis internal, yaitu secara realita bahwa setiap unsur manajemen harus memiliki Inovasi untuk menciptakan suasana kondusif internal perusahaan.
4. Perspektif pertumbuhan atau perluasan bidang usaha.

3. Prinsip-Prinsip Inovasi

Prinsip Inovasi Menurut Kuratko dan Hodgetts (2007), Inovasi memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- Be action oriented Inovator harus selalu aktif menciptakan ide-ide baru, peluang, atau sumber Inovasi.
- Membuat produk, proses, atau jasa yang sederhana dan mudah dipahami orang dengan cepat memahami bagaimana Inovasi

bekerja.

- Memulai dari yang kecil Inovator harus memulai dari yang kecil, kemudian memiliki ide untuk membangun, mengembangkan, dan memungkinkan untuk bertumbuh pada perencanaan dan ekspansi yang tepat dengan cara yang benar pada waktu yang tepat.
- Tujuan yang tinggi Inovator harus memiliki tujuan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dan mencari kedudukan yang sesuai di pasar.
- Try/test/revise Inovator harus mengikuti aturan yaitu mencoba, menguji, dan merevisi. Ini sangat membantu pekerjaan apapun kelemahan dalam produk, proses, atau jasa.
- Belajar dari kesalahan Inovasi tidak dapat menjamin kesuksesan. Bahkan dari kegagalan dapat menciptakan Inovasi.

II.3 Program Lorong Wisata

1. Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, Suti'ah dkk, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah konsep prinsip dan kegiatan (dalam penyelenggaraan negara, perekonomian, dll) yang akan dilaksanakan. Jika membahas secara konsep, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh badan/organisasi utama yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai keinginan dan tujuan serta menerima alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi masyarakat.

Pariata Westra dkk. (1989:236) menyatakan bahwa “Sebuah program adalah suatu rumusan yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dengan petunjuk bagaimana melakukannya”. Selanjutnya Sondang P. Siagian (2006:17) “Perumusan program kerja adalah detail, bukan rencana. Untuk pembangunan negara, program kerja dilakukan dalam berbagai bentuk dan kegiatan. Terry dalam Tachjan (2006:31), menjelaskan bahwa program merupakan rencana induk yang menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Program menggambarkan tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan bentuk rencana yang dijalankan dengan integritas dengan melibatkan semua pihak dengan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa suatu program adalah bagian dari suatu kebijakan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Charles O. Jones (1996:295), beberapa ahli menyarankan di antara mereka sendiri bahwa karakteristik tertentu yang dapat membantu individu

menentukan apakah suatu kegiatan adalah program adalah:

1. Program cenderung mengarahkan kepada karyawan, seperti pelaksana atau aktor dalam program.
2. Program biasanya memiliki anggaran sendiri, terkadang program juga ditentukan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitasnya sendiri, yang jika dikelola dengan baik, dapat dikenali oleh publik.

2. Konsep Lorong Wisata

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ala kemandirian lokal merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik 32 yang dimiliki (Amien, 2005). Sependapat dengan hal tersebut Arianto dan Eliza (2013) mengemukakan bahwa selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian lokal di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya. Salah satu wujud kemandirian lokal yang tercipta dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberdayaan kawasan lorong di Kota Makassar. Ratusan lorong di kota Makassar telah mengalami revitalisasi dan pembenahan dengan berbagai program yang menyentuh seluruh aspek kehidupan warga lorong.

Penataan lorong yang diprogramkan Pemerintah Kota Makassar dan diberi nama Lorong Wisata merupakan serangkaian bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lorong yang menjadi tempat tinggal mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (KP3) Kota Makassar, terdapat 7.538 lorong yang dihuni sekitar 535.000 orang. Untuk itu program Lorong Wisata merupakan program strategis pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan masyarakat Makassar. Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata yang diluncurkan pada 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan dengan Hari Kemerdekaan RI dan mengharapkan program Lorong Wisata akan menjadi program unggulan yang akan mengenalkan Kota Makassar pada dunia serta berbagai program strategis dari masing-masing bagian diharapkan mampu disinkronkan agar menjadi lebih kompleks.

Walikota Makassar membentuk Dewan Lorong yang disingkat D'Lor, mereka bertugas di Lorong Wisata, sebagai motivator bagi warga yang ada di 33 lorong, menjaga properti lorong dan mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar. Adapun tujuan Lorong Wisata yaitu:

1. Program ini diharapkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi;
2. Membangun kesadaran/perilaku warga akan pentingnya kebersihan dan keindahan lorong;
3. Mengaplikasikan ide kreatifitas warga sekitar;
4. Mengenalkan Makassar pada Dunia.

Pembentukan Program Lorong Wisata dibuat atas dasar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 dimana program ini merupakan perwujudan kebangkitan ekonomi masyarakat di kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Setiap kelurahan di kota

Makassar sejak awal peluncuran program Lorong Wisata tahun 2022 telah mengupayakan untuk membuat 7 (tujuh) Lorong Wisata yang merupakan target dari Walikota Makassar yaitu membuat tujuh Lorong Wisata di setiap kelurahan di Kota Makassar dimana pada setiap Lorong Wisata memiliki penanggung jawab masing-masing.

Manfaat Lorong Wisata yaitu sebagai basis ekonomi kebangkitan yang di dalamnya berisi edukasi kesejahteraan dan menanamkan mental mandiri pada warga pada setiap lorong serta local influencer. Lorong Wisata diharapkan mampu menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu daerah destinasi bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan beraneka ragam kulinernya seperti kacang disco, kerupuk bawang, bakso, gado-gado, mie kuah dan mie goreng. Sedangkan potensi tanaman yaitu tanaman hias, apotik hidup/sayuran, tanaman buah dan juga membuat mural dengan hiasan tanaman. Tak hanya itu, Lorong Wisata juga mengembangkan potensi kerajinan tangan daur ulang seperti tempat tisu, pot bunga, sandal dan kerajinan lainnya dengan bahan daur ulang.

II.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dasar yang berkaitan dengan penelitian *Collaborative Governance* dan menggunakan Teori Ansel and Gash (2007), yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian terdahulu
Yoseph Molla, Tjahya Supriatna dkk (2021)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat	Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan kampung wisata Praijing di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak.	Berdasarkan pendekatan teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kampung wisata belum berjalan secara efektif dilihat dari faktor berikut ini 1) Kondisi Awal, pada penelitian ini dijelaskan bahwa suka duka bersama para penggagas dan masyarakat kampung Praijing menjadi kondisi awal yang membangkitkan keinginan, insentif dan kebutuhan untuk berkolaborasi di antara masyarakat dan penggagas kampung wisata Praijing; 2) Desain Kelembagaan, dimulai dari pembentukan Lembaga-lembaga yang mengelola kampung wisata Praijing. Dalam hal ini pengangkatan pengurus kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) kampung Praijing di Desa Bara Kecamatan

			<p>Kota Waikabubak yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 dan dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tebara. Disisi lain juga ada kelembagaan yang juga bersama dengan Kelompok Sadar Wisata untuk memfasilitasi kampung wisata Praijing melalui Badan Usaha Milik Desa Tebara yaitu Bumdes Iyya Tekki;</p> <p>3) Kepemimpinan Fasilitatif, Dalam kaitannya dengan pengelolaan Kampung wisata Praijing di Desa Tebara bahwa kepala Desa tebara dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Swasta, akademisi dan masyarakat; 4) Proses Kolaborasi, Dalam Proses Kolaborasi di kampung wisata praijing, Pemerintah selalu melakukan Pendekatan melalui dialog dan berdiskusi bersama dengan masyarakat dan pengelola kampung wisata Praijing. Setiap bulan selalu dilakukan</p>
--	--	--	---

			<p>rapat rutin membahas terkait dengan pengelolaan kampung wisata Praijing. Dalam pengelolaan kampung wisata Praijing membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut dalam membantu proses keberlangsungan kampung.</p>
<p>Hendra Irawan, Nurliah Nurdin (2022)</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengamati <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hal berikut: 1) Kondisi Awal, Kondisi awal kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu disebabkan karena 2 faktor yang menyebabkan, pertama adalah belum adanya Talud/ tanggul pembatas saluran air dan pemukiman warga yang kedua adalah naiknya permukaan dasar sungai/kali karena material pasir dan tanah yang dibawa pada saat banjir sehingga apabila curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir; 2) Desain Kelembagaan, dalam menghadapi persoalan banjir di Kabupaten Sula tak hanya pihak swasta maupun</p>

			<p>pemerintah yang terlibat dalam suatu kelembagaan akan tetapi terdapat beberapa Organisasi Masyarakat dan Pemuda yang turut serta mencari dan memberikan bantuan setelah kejadian bencana. Elemen mahasiswa dan pemuda yang langsung datang ke lokasi tersebut diantaranya Serikat Pemuda Kepulauan Sula (SEKEPAL), Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gema Rakyat), Solidaritas Fina Sua (SOFIA), Aliansi Pemuda Sula (APS), dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND); 3) Kepemimpinan Fasilitatif, Penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya dalam penanggulangan banjir sebagai Sekretaris Daerah, Ex Officio Kepala BPBD yaitu sebagai instansi dan lembaga yang menangani permasalahan banjir sehingga proses kolaborasi dalam menjalin komunikasi dan</p>
--	--	--	--

			<p>penghubung antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat; 4) Proses Kolaborasi, <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula melalui pendekatan teori Ansell and Gash yang peneliti amati bahwa proses kolaborasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1) Tahap pra bencana, 2) Tahap tanggap darurat, 3) Tahap pasca bencana belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi atau perguruan tinggi. Kurangnya sumber daya dari sisi Anggaran maupun Peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat (Eksavator) untuk melakukan normalisasi dan minimnya anggaran penanggulangan bencana untuk pembuatan Talud/ tanggul.</p>
--	--	--	--

<p>Elsa Trisniati, Juliannes Cadith dkk (2021)</p>	<p><i>Collaborative Governance</i></p> <p>Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus</p>	<p>Penelitian ini menggunakan <i>collaborative governance</i> model dari Ansell & Gash (2008) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif (<i>collaborative governance</i>) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dengan mengacu pada model Ansell & Gash (2008: 549-550).</p>	<p>Hasil penelitian ini menggunakan empat dimensi <i>collaborative governance</i>, yaitu 1) Kondisi Awal, Dalam penelitian <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung masih terdapat ketidakseimbangan sumber daya di antara para pemangku kepentingan. PT Banten West Java sebagai pihak swasta dan badan usaha pengelola KEK Tanjung Lesung memiliki sumber daya berupa kekuasaan atas lahan/kawasan dan sumber daya finansial; 2) Desain Kelembagaan, Pada kolaborasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, partisipasi para pemangku kepentingan dalam berkolaborasi masih kurang. Hal ini terjadi karena keterbatasan peran dari status pemangku kepentingan itu sendiri; 3) Kepemimpinan Fasilitatif, Pada penelitian kolaborasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, peran pemimpin atau kepemimpinan fasilitatif masih sangat kurang. Kepemimpinan fasilitatif</p>
--	---	---	--

			<p>terdapat pada peran pemerintah yang dapat menjadi mediator komunikasi antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lain. Akan tetapi pada pemerintah sendiri masih kurang koordinasi, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten; 4) Proses Kolaborasi, Proses kolaborasi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung dalam perencanaan bersifat koordinasi karena yang menyusun rencana pengembangan KEK adalah pihak swasta sebagai badan pengelola dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sementara dalam pelaksanaan bersifat kolaborasi karena melibatkan masyarakat, media dan akademisi.</p>
--	--	--	---

II.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan pustaka diatas maka peneliti merancang kerangka pikir dengan teori dimensi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

